

newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 141, April 2021



Gubernur Lemhannas RI Hadiri Webinar Urgensi Penyusunan Kurikulum Bela Negara di Tingkat Perguruan Tinggi	2
Gubernur Lemhannas RI menjadi narasumber Dalam Webinar Nasional "Mewujudkan Indonesia Emas 2045"	3
Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua di Lingkungan Lemhannas RI	4
Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	5
Studi Strategis Dalam Negeri PPRA 62 Lemhannas RI di Empat Provinsi	6
Lemhannas RI Laksanakan Diseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional Sulawesi Tengah	7
Provinsi Kepulauan Riau Dipilih Menjadi Lokus Kajian Lemhannas RI	8
Irjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. Dilantik Menjadi Sekretaris Utama Lemhannas RI	9
Upacara Pembukaan PPSA 23 Lemhannas RI	10
Sosialisasi "Larangan Keterlibatan ASN Dalam Mendukung Organisasi Kemasyarakatan Terlarang	11

Irjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. Dilantik Menjadi Sekretaris Utama Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Hadiri Webinar Urgensi Penyusunan Kurikulum Bela Negara di Tingkat Perguruan Tinggi

Rabu, 7 April 2021

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Kebangsaan dengan tema “Urgensi Penyusunan Kurikulum Bela Negara di Tingkat Perguruan Tinggi”. Webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kajian dan Riset Bela Negara ini terselenggara pada Rabu (7/4) secara daring.

Mengawali paparannya, Agus mengutip definisi bela negara yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran dan profesinya.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan bahwa bela negara merupakan gagasan yang memiliki cakupan nasional dan bermuara pada cinta tanah air. Bela negara tidak hanya lingkup persenjataan saja, tapi termasuk juga pikiran cerdas di semua

sektor dan lini dalam rangka menjaga kedaulatan, martabat, dan harga diri bangsa. “Bela negara bukan hanya tugas tentara, melainkan tugas seluruh warga negara,” tutur Agus.

Kemudian Agus menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Agus berpendapat bahwa, hanya satu dari lima nilai yang bermuara pada keanggotaan TNI, yakni memiliki kemampuan awal bela negara. Sisanya bukan berada pada aspek pertahanan, melainkan berada pada aspek kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, serta pengetahuan berbangsa dan bernegara yang bukan fokus utama dari Kementerian Pertahanan.

Empat dari lima nilai dasar dalam bela negara, menurut Agus berada pada domain pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberi keseimbangan pada seluruh lembaga terkait, agar mampu

membangun kesadaran bela negara melalui lini pendidikan formal dan non formal.

Agus menilai perlu ada kesepahaman dalam penafsiran definisi terhadap bela negara itu sendiri ebelum menyusun kurikulum Perguruan Tinggi karena fungsi penataan sistem bela negara belum memberikan makna yang dapat dilaksanakan secara konkret, komprehensif, dan final. “Nyatanya banyak multitafsir tentang bela negara,” ujar Agus.

Menurut Agus yang harus dibekalkan pada kurikulum tingkat perguruan tinggi adalah cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Bela negara sendiri hakikatnya adalah cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu sarana pendukungnya adalah melalui pelajaran kewarganegaraan dan pelajaran sejarah kebangsaan. “Jika kita tidak mengenal sejarah kebangsaan kita sendiri, kita tidak bisa menghargai bangsa kita sendiri,” tutur Agus.



Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Webinar Nasional “Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

Kamis, 8 April 2021

4

PILAR UTAMA YANG MENJADI KERANGKA PEMBANGUNAN KITA SAAT INI MENUJU 2045

PILAR 1

Menggenjot secara serius pembangunan SDM yang mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, harus ada peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan iptek dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat terus meningkat, serta reformasi ketenagakerjaan.

PILAR 2

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri. Harus ada percepatan di dunia industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.

PILAR 3

Tingkat kemiskinan harus ditekan dengan usaha meningkatkan kesempatan usaha dan pendapatan secara merata. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan merata juga tidak boleh kendor.

PILAR 4

Memantapkan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan berlandaskan demokrasi substantif. Melanjutkan reformasi kelembagaan dan birokrasi, penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi, politik luar negeri bebas aktif, serta penguatan ketahanan dan keamanan adalah keharusan.

4 Pilar Utama yang menjadi kerangka pembangunan Indonesia menuju 2045



menjadi kerangka pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Pilar pertama, menggenjot secara serius pembangunan SDM yang mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Selain itu, harus ada peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat terus meningkat, serta reformasi ketenagakerjaan,” ucap Agus.

Kemudian pilar kedua, yakni pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri. Menurut Agus, harus ada percepatan di dunia industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, dan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya pilar ketiga, tingkat kemiskinan harus ditekan dengan usaha dan pendapatan secara merata. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan merata juga tidak boleh kendor. Terakhir pilar keempat, memantapkan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan berlandaskan demokrasi substantif. Agus menegaskan harus adanya reformasi kelembagaan dan birokrasi, penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi, politik luar negeri bebas aktif, serta penguatan ketahanan dan keamanan adalah keharusan.

Menghadiri Webinar Nasional “Mewujudkan Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Universitas 17 Agustus 1945, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menjadi salah satu narasumber pada Kamis (8/4) secara daring.

Dalam paparannya Agus mengutip dari Human Development Report 2020 milik PBB, bahwa usia Harapan Hidup Indonesia yang berada di angka 71.7 tahun, masih dibawah rata-rata dunia yang berada di angka 72.8 tahun, hal ini masih memiliki korelasi dengan ketersediaan

dokter per 1000 penduduk Indonesia hanya berada di rata-rata angka 0,4 sedangkan rata-rata dunia 1,6.

Masih dari laporan yang sama, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia dinyatakan pada angka USD 11,459 dan masih dibawah rata-rata dunia pada USD 16,734 dan menempatkan Indonesia di posisi 103 dari 189 negara. Hal ini jelas mengungkapkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki untuk mengejar Indonesia Emas 2045 yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Berangkat hal tersebut, Agus kemudian menyampaikan empat pilar utama yang ditawarkan untuk

Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua di Lingkungan Lemhannas RI

Rabu, 31 Maret 2021

Dua pekan usai vaksinasi Covid-19 dosis pertama, Lemhannas RI melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada Rabu, (31/3) di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. Peserta vaksinasi kali ini adalah personel Lemhannas RI yang sudah menerima dosis pertama sebelumnya dan berusia dibawah 60 tahun.

Pemberian kedua dosis tersebut dimaksudkan agar imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 dapat terbentuk secara maksimal. Diharapkan dengan diselenggarakannya vaksinasi Covid-19 di Lemhannas RI akan menjadi salah satu upaya mendukung pemutusan rantai penularan Covid-19. Sejumlah personel dan peserta pendidikan di

Lemhannas RI yang sebelumnya sudah melaksanakan vaksin tahap pertama menyatakan bahwa vaksinasi covid-19 aman dan tidak perlu ditakuti atau dikhawatirkan.

Penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di lingkungan Lemhannas RI terselenggara berkat bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan (BPPSDM

Kemenkes), Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah fasilitator yang berasal dari Puskesmas Gambir, Poliklinik Badan Intelijen Negara, Puskesmas Sawah Besar, dan RS Medistra.



Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab **Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional**

Rabu, 31 Maret 2021



Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menjadi Pembina Upacara Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, yang berlangsung pada Rabu (31/3) di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai 1, Lemhannas RI.

“Pada hari ini saya selaku Gubernur Lemhannas RI menerima penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI,” ucap Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo.

Dalam upacara yang menandai selesainya masa bakti dinas aktif Mayjen TNI Rahmat Pribadi sebagai Perwira Tinggi Angkatan Darat, Agus menyatakan bahwa penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat

Nasional Lemhannas RI bukan sekedar seremonial biasa, karena jabatan tersebut memiliki peran vital dalam penyelenggaraan tugas Lemhannas RI.

Mencermati pentingnya fungsi dan tugas tersebut, Agus memandang perlu menunjuk pelaksana tugas Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan untuk memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Lemhannas RI tetap berjalan dengan baik, lancar, efektif dan efisien.

Pada kesempatan tersebut, Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Mayjen TNI Rahmat Pribadi atas dedikasi dan pengabdian selama ini. Lebih lanjut Agus meyakini bahwa kinerja dan prestasi Mayjen TNI Rahmat Pribadi menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI.



Kinerja dan prestasi Mayjen TNI Rahmat Pribadi menjadi Inspirasi bagi generasi penerus.

Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Studi Strategis Dalam Negeri PPRA 62 Lemhannas RI di Empat Provinsi

Senin, 5 April 2021

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 yang terbagi dalam empat kelompok melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) selama empat hari, dimulai Senin (5/4) hingga Kamis (8/4), ke empat tujuan yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung.

Studi strategis dalam negeri, merupakan salah satu program kegiatan yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada para peserta dalam mempelajari, memahami dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Peserta PPRA 62 diharapkan dapat mempraktikkan seluruh teori dan wawasan yang dimiliki untuk menjadi suatu produk karya tulis ilmiah yang

berisi kajian dan rekomendasi kebijakan terkait dinamika pembangunan nasional di masing-masing daerah yang dikunjungi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peserta PPRA 62 Lemhannas RI selaku kader dan pimpinan tingkat nasional.

Dalam kegiatan SSDN, para peserta PPRA 62 mendapatkan pendampingan. Untuk SSDN provinsi Jawa Barat, para peserta didampingi oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo. Untuk rombongan SSDN Provinsi Banten, peserta mendapat pendampingan dari Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan. Kemudian SSDN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan untuk SSDN Provinsi Lampung didampingi oleh Tenaga Ahli

Pengkaji Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI Laksda TNI Erman Syafril, S.H., M.M, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI Dr. Yulianus Pongtuluran, S.E., M.Ed., dan Direktur Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Mochammad Yasin.

Dengan diselenggarakannya SSDN, diharapkan para peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan dapat memiliki kepekaan terhadap spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari NKRI, meningkatkan wawasan kebangsaan, dan mendapat gambaran tentang kondisi ketahanan nasional serta mengetahui lebih dekat tentang progres pembangunan nasional di daerah yang dikunjungi.



Lemhannas RI Laksanakan **Diseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional Sulawesi Tengah**

Kamis, 8 April 2021



Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P beserta jajarannya berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Kamis (8/4), guna melaksanakan Kegiatan Diseminasi Pengukuran Ketahanan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Diseminasi tersebut dilaksanakan untuk menjelaskan manfaat dari hasil pengukuran Ketahanan Nasional bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional di daerah. Karena jika manfaat pengukuran ketahanan nasional dipahami dengan baik akan berdampak terhadap pada proses memasukan data ke dalam Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas). “Ketahanan nasional memiliki nilai yang sangat strategis bagi terjaminnya kelangsungan hidup kita bangsa Indonesia,” ujar Suroto.

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan mulai dari persoalan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan,

separatisme, terorisme dan radikalisme, intoleransi, sampai dengan pandemi Covid-19. “Apabila kita tidak memiliki ketahanan atau daya survive yang sangat tangguh, tidak menutup kemungkinan itu semua akan berpotensi membahayakan negara,” ungkap Suroto.

Oleh karena itu, Suroto menegaskan bahwa kondisi ketahanan nasional Republik Indonesia harus senantiasa dapat dipantau untuk mewaspadai dan menjaga agar kondisi ketahanan nasional Republik Indonesia senantiasa berada pada kondisi yang sangat aman, walaupun ketika harus dihadapkan dengan berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi kedepannya.

Suroto juga berpendapat bahwa dengan mengetahui kondisi ketahanan nasional tersebut, Indonesia dapat mengambil langkah, upaya, dan antisipasi strategis dengan melakukan penguatan pada aspek-aspek tertentu yang dinilai masih lemah, melalui program-program pembangunan nasional baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.



Apabila kita tidak memiliki ketahanan atau daya survive yang sangat tangguh, itu berpotensi membahayakan negara.

Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P.
Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI

Provinsi Kepulauan Riau Dipilih Menjadi **Lokus Kajian**

Rabu - Kamis, 7-8 April 2021



Salah satu cara menjaga nilai-nilai Pancasila adalah dengan memberikan pengetahuan wawasan kebangsaan yang lebih luas.

Marsdya TNI Wieko Syofyan.
Wakil Gubernur Lemhannas RI

sebuah negara, serta memiliki landasan yang kokoh agar tidak jatuh kepada nilai-nilai yang merugikan bangsa.

Media sosial, menurut Wieko, dapat digunakan untuk menginformasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan secara luas kepada masyarakat sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Wieko Syofyan bersama sejumlah pejabat dan personel Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI melakukan kunjungan lokus kajian di Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu dan Kamis (7-8/4).

Kunjungan lokus di Provinsi Kepulauan Riau merupakan rangkaian kegiatan kajian strategik Lemhannas RI dalam pengumpulan data dan informasi guna mendalami materi Kajian Jangka Panjang dengan judul "Optimalisasi Peran Media Sosial Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan".

Dipilihnya Provinsi Kepulauan Riau menjadi lokus kajian karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Pulau Sumatera dan peringkat keempat nasional dengan skor 75,48.

"Media sosial saat ini bahkan sudah menjadi candu bagi masyarakat, hampir tidak ada warga perkotaan yang

tidak mengakses media sosial," ujar Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan.

Seiring dengan terbukanya arus informasi, muncul berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut Wieko menyampaikan bahwa tantangan terbesar adalah ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa tidak lagi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pancasila merupakan ideologi hidup di tengah masyarakat yang harus selalu dijaga," ujar Wieko. Keutuhan Indonesia sebagai negara kesatuan tergantung dari bagaimana warga negara menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Wieko menjelaskan bahwa salah satu cara menjaga nilai-nilai Pancasila adalah dengan memberikan pengetahuan wawasan kebangsaan yang lebih luas, sehingga masyarakat mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai visi besar dari

Irjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si Dilantik Menjadi Sekretaris Utama Lemhannas RI

Selasa, 13 April 2021

Irjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si dilantik secara resmi sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo pada Selasa, (13/4) di Ruang Nusantara Gedung Trigatra Lantai 1 Lemhannas RI. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Agus menilai bahwa pelantikan dan pengangkatan sumpah janji pejabat Sekretaris Utama Lemhannas RI merupakan salah satu sarana regenerasi dan penyegaran karier personel. "Kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan negara kepada pejabat yang dilantik merupakan amanah yang harus dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab," harap Agus.

Selain itu, Agus menegaskan bahwa Sekretaris Utama selaku pejabat pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan strategis pada suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). "Saya berpesan agar Sekretaris Utama menyiapkan langkah-langkah strategis, mempertahankan apa yang sudah baik dan memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang menjadi bahan evaluasi," ujar Agus.

Pesan yang disampaikan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi dan pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Lemhannas RI dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Agus berharap Sekretaris Utama mampu mewujudkan sinergi diantara unit-unit kerja dalam suasana yang kondusif dan harmonis,

menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif guna menunjang tugas sebagai pimpinan, mampu memotivasi dan memberi inspirasi pada jajaran dibawahnya sehingga mampu menunjukkan performa dan kinerja kelembagaan yang nantinya akan mampu mewujudkan harapan besar masyarakat, bangsa, dan negara yang dipercayakan kepada Lemhannas RI.



Upacara Pembukaan PPSA 23 Lemhannas RI

Rabu, 14 April 2021



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo secara resmi membuka Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Lemhannas RI. Kegiatan PPSA 23 yang dilaksanakan selama 5,5 bulan diikuti 60 orang yang terdiri dari berbagai unsur, yakni unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 10 orang, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 25 orang, unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 9 orang, dan unsur lainnya sebanyak 16 orang.

“Amanah dan kepercayaan negara yang diberikan kepada saudara-saudari harus dapat dijalankan dengan niat yang tulus untuk menimba ilmu di lembaga yang kita banggakan bersama ini,” ujar Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo. Agus yakin bahwa para peserta telah memiliki kemampuan akademis dan latar belakang pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi, namun memiliki kemampuan akademis dan kewenangan

dalam jabatan saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin tingkat nasional. Etika, moral, dan kejujuran merupakan prasyarat lainnya yang harus dimiliki untuk membentuk karakter pemimpin yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang mencerminkan pemahaman atas konsensus dasar bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan para peserta di Lemhannas RI harus disertai dengan tekad untuk melakukan revolusi mental, transformasi sikap, dan perilaku yang mencerminkan sosok kader pimpinan tingkat nasional dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat. Agus juga menyampaikan bahwa program pendidikan di Lemhannas RI berfungsi untuk mempertajam dan meningkatkan kapasitas serta efektifitas kepemimpinan. “Keikutsertaan para peserta dalam mengikuti pendidikan merupakan penyegaran dan investasi untuk memperkaya kapasitas

kepemimpinan saat nanti diperlukan kembali untuk berkarya di lapangan setelah lulus pendidikan Lemhannas RI,” ujar Agus. Oleh karena itu, Agus menegaskan pentingnya para peserta untuk memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya.

PPSA 23 yang diselenggarakan di tengah pandemi memiliki beberapa keterbatasan yang tidak bisa dihindari. Memandang hal tersebut, para peserta diharuskan berpedoman pada protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan virus Covid-19. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Lemhannas RI adalah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada para tenaga pendidik dan unit kerja terkait lainnya. “Oleh karenanya dalam upaya untuk menyelesaikan tugas belajar dengan baik, protokol kesehatan terhadap covid-19 harus tetap menjadi perhatian utama,” tutup Agus.

Sosialisasi “Larangan Keterlibatan ASN dalam Mendukung Organisasi Kemasyarakatan Terlarang”

Selasa, 30 Maret 2021

JENIS PELANGGARAN

MENURUT SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)

11 JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN SKB PENANGANAN RADIKALISME DALAM RANGKA PENGUATAN WAWASAN	1	Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
	2	Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan
	3	Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (<i>share, broadcast, upload, retweet, repost</i> dan sejenisnya)
	4	Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberi <i>dislike, love, retweet</i> atau <i>comment</i> di media sosial
	5	Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
	6	Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial
	7	Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan menentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
	8	Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
	9	Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
	10	Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan/atau
	11	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.



Lemhannas RI berkomitmen melarang ASN-nya terlibat dalam kegiatan mendukung organisasi kemasyarakatan terlarang. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Kerja Sama dan Hukum Setema Lemhannas RI, mengadakan sosialisasi internal tentang “Larangan Keterlibatan ASN dalam mendukung Organisasi Kemasyarakatan Terlarang” pada Selasa (30/3) secara daring.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Setema Lemhannas RI, Laksma TNI Sri Widodo, S.T., CHRMP, menghadirkan narasumber Rosdiana, S.E., salah satu Analis Kebijakan Ahli Madya Integritas SDM Aparatur Kementerian PANRB RI.

Sri Widodo dalam sambutannya mengungkapkan era keterbukaan dan banjirnya informasi yang tidak terverifikasi dapat memunculkan masalah bagi Indonesia. Lebih lanjut ia

mengatakan permasalahan yang timbul bagi bangsa Indonesia yang majemuk akan lebih kompleks.

“Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan semacam ini sangatlah mungkin terjadi di negara-negara lain di seluruh dunia. Bagi bangsa Indonesia, dengan kondisi kemajemukannya tentu akan lebih besar dan kompleks permasalahan yang akan dihadapinya,” ujar Sri Widodo.

Sedangkan Rosdiana selaku narasumber memaparkan dasar pelarangan keterlibatan ASN dalam mendukung organisasi kemasyarakatan terlarang. Ia kemudian membahas SE Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan atau mendukung organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Rosdiana mengatakan perilaku ASN diatur tidak hanya pada saat jam kerja saja. “ASN itu melekat 24 jam profesi, aturannya, perilakunya”, ujarnya mengingatkan.

Selain itu, Rosdiana menjelaskan sebelas jenis pelanggaran menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga. Surat keputusan tersebut banyak menyoroti perilaku ASN dalam penggunaan sarana komunikasi digital. Enam dari sebelas poin pelanggaran dalam surat tersebut memuat istilah “media sosial”.

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, bila ada aduan masyarakat mengenai pelanggaran perilaku ASN pada laman aduanasn.id, hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim satgas 11 kementerian/lembaga untuk membuat rekomendasi penanganan pelanggaran bagi ASN terlapor melalui Pejabat Pembina Kepegawaian.



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Agus Arif Fadila** Redaktur: **Alton Endarwanto Hadi Susanto**

Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**

Penerjemah: **Endah Heliana** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini, Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi**

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>